



Pemetaan Daerah Rawan Sangat Penting

■ Perlu Bahas Mitigasi Kebencanaan Sungai

YOGYA, TRIBUN - Komisi A DPRD DIY menyebut perlunya sinergitas yang kuat baik dari masyarakat hingga pemangku kebijakan untuk mengatasi dampak bencana, khususnya di kawasan sungai. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan daerah rawan.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Srwanto menjelaskan, pemetaan daerah rawan merupakan bekal bagi pemangku kebijakan untuk menentukan strategi bahkan anggaran.

"Untuk itu Komisi A bersama Pemda harus duduk bareng dengan BBWSSO serta instansi terkait untuk membahas mitigasi kebencanaan di sungai. Kebijakan yang penting saat ini adalah pemetaan daerah rawan, kemudian kita rancang strategi pembangunan yang didukung anggaran," katanya usai seminar kemitraan terkait kebencanaan di kompleks DPRD DIY, Selasa (28/1). Seminar tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan lapangan Komisi A di Pundong, Bantutungan Kali Bunting, Yogyakarta. Ia pun mengajak masyarakat

untuk merawat dan melestarikan sungai di DIY. Menurut dia gerakan cinta sungai harus terus digaungkan, salah satunya dengan aksi menanam pohon di kawasan sungai. Ia menilai pohon dapat memperkuat struktur tanah di bantaran sungai.

"Ayo gelorakan gerakan cinta sungai. Kita semua harus berkomitmen, baik masyarakat, DPRD, dan juga Pemda untuk merawat sungai. Tetapi gerakan ini juga harus didukung dengan penegakan aturan-aturan, supaya tidak ada pihak yang merusak sungai," lanjutnya. Eko juga meminta Pemda DIY dan BBWSSO untuk segera membenahi talud yang rusak dan rawan longsor.

Belum Dipetakan
Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana menambahkan semua sungai yang mengalir di DIY memiliki hulu di Gunung Merapi dan bergilir di laut selatan dan saat ini belum dipetakan. Dengan adanya dorongan Komisi A DPRD DIY maka BPBD DIY, baru akan memetakan kondisi sungai-sungai tersebut.

PENTING PETAKAN SUNGAI

- Komisi A DPRD DIY menyebut perlunya sinergitas untuk mengatasi dampak bencana, khususnya di kawasan sungai.
- Pemetaan daerah rawan jadi bekal bagi pemangku kebijakan untuk menentukan strategi bahkan anggaran.
- Komisi A bersama Pemda harus duduk bareng dengan BBWSSO serta instansi terkait untuk membahas mitigasi kebencanaan di sungai.
- Gerakan cinta sungai harus terus digaungkan, salah satunya dengan aksi menanam pohon di kawasan sungai.
- BPBD belum akan memetakan kondisi sungai-sungai di DIY.
- BPBD Kota Yogyakarta mencatat sedikitnya ada 17 titik talud sungai di Kota Yogyakarta yang berpotensi longsor jika terjadi hujan lebat.

"Sungai-sungainya panjang dan memang ada beberapa tempat yang dinilai rawan, nah untuk menunjukkan kerawanan ini diperlukan peta yang jelas dan terimakasih kepada Komisi A DPRD DIY yang mendukung pemetaan tersebut," tambahnya.

Sementara itu, BPBD Kota Yogyakarta mencatat sedikitnya ada 17 titik talud sungai di Kota Yogyakarta yang berpotensi longsor jika terjadi hujan lebat. Kepala BPBD Kota Yogyakarta, Hari

Wahyudi menjelaskan, lokasi Talud yang rawan longsor itu tersebar di empat sungai besar serta beberapa sungai kecil.

"Kalau sungai besar seperti Code, Winongo, dan Gajah Wong, Sungai kecilnya misal di Manunggal dan Bunting," jelasnya, belum lama ini.

Pihaknya pun mengaku sudah melakukan peringatan dan juga imbauan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran kali untuk waspada pada tanda-tanda longsor. Warga sudah diminta segera mengungsi jika sudah muncul tanda-tanda longsor. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi munculnya korban jiwa jika sewaktu-waktu talud yang rawan itu ambrol.

"Jika terjadi hujan lebat dalam waktu lama. Warga yang tinggal dibawah atau atas talud yang rawan longsor segera mengungsi. Ini untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa," kata dia. (mawjst)

Yogya

Lo: Trihastono, S.Sos, MM

1.	☐ Negatif	☐ Amat Sangat
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.	☐ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

✓. BPBD
✓. Netral
✓. Biasa
✓. Untuk di bahas

Dorong Inventarisasi Talut

KETUA Komisi C DPRD Kota Yogya, Ririk Banowati mengatakan, perlu adanya sistem inventarisasi talut oleh Pemkot Yogya. Sehingga, pihaknya bingung sewaktu terdapat talut yang ambrol maupun rawan karena kewenangan yang masih simpang siur.

Seperti talut ambrol yang terjadi di wilayah Serangan beberapa waktu lalu. Pemkot kemudian hanya menanggulangi talut itu secara sementara dengan menutupinya dengan karung berisi pasir dan terpal untuk mengantisipasi longsor semakin meluas.

Maka itu, pihaknya ke depan akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memetakan talut yang masuk ke ranah Pemkot maupun bukan. Politisi Gerindra ini juga menyatakan bahwa, diperlukan inventarisasi talut yang jelas dalam waktu dekat sehingga tindakan yang tepat bisa dilakukan pada talut yang rawan longsor.

"Jadi ke depan yang lebih penting inventaris aset jadi tahu mana yang kewenangan Pemkot dan mana punya balai besar," ujar Ririk. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005